

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Daftar Singkatan	xx
Glosarium	xxiii
Abstrak	xxv
Abstract	xxvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	18
1.3. Tujuan Penelitian	23
1.4. Tinjauan Pustaka	24
1.5. Kerangka Konseptual	35
1.6. Metode dan Sumber	45
1.7. Sistematika Penulisan	50
BAB 2. KONSERVATISME MILITER DALAM PERANG DAN PERUBAHAN: PERILAKU POLITIK ANGKATAN DARAT	56
2.1. Lahir dari Rahim Rakyat: Tentara Revolusi dan Konsolidasi Kekuatan	56
2.2. Konsep Peran dan Kedudukan Tentara Indonesia	66
2.3. Sudirman <i>Legacy</i> : Kepemimpinan, Konservatisme Militer, dan Doktrin Ketentaraan Sudirman	92
2.4. Angkatan Darat sebagai Identitas yang Berbeda	104
2.5. Simpulan	116
BAB 3. PERISTIWA 17 OKTOBER 1952: RESISTENSI ANGKATAN DARAT TERHADAP KEKUATAN POLITIK SIPIL	118
3.1. Perubahan Sistem Politik dan Respons Angkatan Darat: Akar Ketegangan Menuju	119

	Peristiwa 17 Oktober 1952	
3.2.	Konfrontasi Parlemen dengan Angkatan Darat: Ancaman Demokrasi Model Barat	129
3.3.	Peristiwa 17 Oktober 1952: Bubarkan Parlemen!	148
3.4.	Angkatan Darat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952	159
3.5.	Simpulan	173
BAB 4.	GEJOLAK PASCA 17 OKTOBER 1952: PERPECAHAN ELITE, PERTARUNGAN NARASI, DAN PERGULATAN KEKUASAAN	175
4.1.	Tanggapan Unsur Sipil atas Peristiwa 17 Oktober 1952	176
4.2.	Terpecahnya Elite Angkatan Darat	188
4.3.	Profesionalisme Militer versus Politisasi Militer di Harian <i>Merdeka</i> dan <i>Indonesia Raya-Pedoman</i>	192
4.4.	Respon Presiden Sukarno	213
4.5.	Nasution dalam Kemelut Politik Peristiwa 17 Oktober 1952	219
4.6.	Pencopotan Nasution: Melemah, Terpecah, dan Kehilangan Semangat	233
4.7.	Simpulan	248
BAB 5.	PENANGANAN KONFLIK, UPAYA REKONSILIASI, DAN WARISAN KONFLIK: REKONSTRUKSI KEKUASAAN ANGKATAN DARAT PASCA 17 OKTOBER 1952	251
5.1.	Pemeriksaan Perwira Tinggi Angkatan Darat oleh Kejaksaan Agung	251
5.2.	Piagam Yogya dan Upaya Rekonsiliasi Internal Elite Angkatan Darat	272
5.3.	Manuver Politik Nasution	281
5.4.	Kelanjutan Konflik Angkatan Darat di Tingkat Teritorial	297
5.5.	Simpulan	320
BAB 6.	MENEMUKAN PANGGUNGNYA KEMBALI: TRANSFORMASI ANGKATAN DARAT MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN	323
6.1.	Undang-Undang Darurat dan Sentralisasi Peran Angkatan Darat	324
6.2.	Kolaborasi Politik Sukarno: Mencari Simbiosis atas Integrasi Angkatan Darat dan	355

	Dukungannya pada Konsepsi Demokrasi Terpimpin	
6.3.	Kembali ke UUD 1945, Dekret Presiden dan Pengukuhan Peran Politik Angkatan Darat	391
6.4.	Panggung Angkatan Darat dalam Kabinet Sukarno	409
6.5.	Simpulan	436
BAB 7.	KESIMPULAN	438
	Daftar Pustaka	447
	Lampiran	464

DAFTAR TABEL

	hlm.
Tabel 1. Surat Kabar dan Majalah sebagai Sumber Penulisan	46
Tabel 2. Hasil Perolehan Suara 10 Besar Partai dalam Pemilu 1955 untuk Anggota DPR dan Konstituante	296
Tabel 3. Restrukturisasi Angkatan Darat Sebelum dan Sesudah Pergolakan Daerah	382

DAFTAR GAMBAR

	hlm.
Gambar 1. Unsur dalam Narasi Sejarah Militer Indonesia	38
Gambar 2. Konsep Militer Indonesia sebagai Produk Revolusi	41
Gambar 3. Dinamika Pers Nasional dan Subjektivitas dalam Pemberitaan	49

DAFTAR LAMPIRAN

	hlm.
Gambar 1. Pemungutan Suara pada Sidang Parlemen Menentukan Mosi Seputar Permasalahan Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan	464
Gambar 2. Permasalahan Angkatan Darat dengan Politik Sipil Menjadi Berita Utama di Beberapa Surat Kabar Menjelang Peristiwa 17 Oktober 1952	464
Gambar 3. Demonstrasi Menuntut Pembubaran Parlemen 17 Oktober 1952	465
Gambar 4. Ribuan Massa Demonstan Dikerahkan Angkatan Darat Menuntut Pembubaran Parlemen pada 17 Oktober 1952	465
Gambar 5. Tentara diantara Para Demonstan di Depan Istana Merdeka	466
Gambar 6. Ruang Sidang Parlemen Dirusak oleh Para Demonstan	466
Gambar 7. Tuntutan Angkatan Darat oleh Presiden Sukarno Dilarang Diumumkan	467
Gambar 8. Berita Tuntutan Para Demonstan Menjadi <i>Headline</i> Surat Kabar Nasional	468
Gambar 9. Pencopotan KSAD Kolonel A.H. Nasution Akibat Demonstrasi 17 Oktober 1952	468
Gambar 10. Angkatan Darat Tercerai Berai Menghadapi Pemeriksaan Terkait Demonstrasi 17 Oktober 1952	469
Gambar 11. Konferensi Perwira AD di Yogyakarta untuk Menggalang Kembali Keutuhan Angkatan Darat, 17-25 Februari 1955	469

Gambar 12.	<i>Press Release</i> Peserta Konferensi Perwira AD di Yogyakarta	470
Gambar 13.	Presiden Sukarno Melantik Kembali AH Nasution Sebagai KSAD Pada 7 Nopember 1955	470
Gambar 14.	Maklumat KSAD Sebagai Penguasa Perang Pusat pada Masa SOB yang Menjadikan Kekuasaan dan Kewenangan Nasution Semakin Besar	471
Gambar 15.	Konflik dan Pengukuhan Peran Dominan AD dalam Politik Indonesia (1950-an)	472